

**ANALISIS KEBIJAKAN SELANDIA BARU DALAM MENCAPAI
PERDAGANGAN INKLUSIF MĀORI MELALUI COMPREHENSIVE
AND PORGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC
PARTNERSHIP (CPTPP) (2019-2023)**

ANDREAS HARI KRISTIYANTO

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menganalisis kebijakan Selandia Baru dalam mencapai sebuah situasi yang disebut perdagangan inklusif terhadap kelompok Māori terutama melalui sebuah perjanjian perdagangan bebas yang bernama CPTPP. Kebijakan Selandia Baru mengambil peran yang sangat penting, bahwasanya dalam topik ini terdapat tiga tantangan utama yang harus diperhatikan Selandia Baru, yakni untuk mencapai perdagangan yang inklusif bagi kelompok Māori diperlukan penyesuaian dan pemahaman yang dalam terkait aspek budaya, politik, dan praktik perdagangan yang dapat sejalan dengan CPTPP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, analisis kebijakan, dan tinjauan literatur untuk memahami hubungan antara Selandia Baru dan Māori dalam bekerjasama di bawah suatu perjanjian perdagangan bebas. Temuan penelitian memperlihatkan, bahwa selama periode 2019-2023 terdapat beberapa langkah sebagai kebijakan Selandia Baru dalam mencapai perdagangan inklusif Māori melalui CPTPP. Kebijakan – kebijakan dalam periode tersebut diantaranya pembentukan dewan resmi, seperti TFAAB yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi dan kritisi terkait keputusan dan kebijakan yang akan dilakukan Crown dalam CPTPP yang menyangkut perdagangan inklusif Māori. Selandia Baru turut membentuk lembaga – lembaga dan komunitas pendukung yang secara khusus bertindak sebagai representasi Māori dalam menyikapi ketentuan – ketentuan yang akan disepakati dalam CPTPP, seperti Te Taumata Nga Toki Whakarururanga, FOMA, dan *the national iwi Chairs Forum*. Periode tersebut Selandia Baru turut memberikan solusi terkait gugatan – gugatan yang dilaporkan oleh Māori, seperti revisi *Plant Variety Act* dan *digital trade*

Kata Kunci: Selandia Baru, Perdagangan Inklusif, Māori, CPTPP

**ANALYSIS OF NEW ZEALAND'S POLICY IN ACHIEVING INCLUSIVE
MĀORI TRADE THROUGH THE COMPREHENSIVE AND
PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP
(CPTPP) (2019-2023)**

ANDREAS HARI KRISTIYANTO

ABSTRACT

This study aims to analyze New Zealand's policy in achieving Māori inclusion in trade through a free trade agreement, known as the CPTPP. New Zealand's policy plays a crucial role in this context, as there are three main challenges that the country must address in order to realize inclusive trade for the Māori, there are the need for adaptation and deep understanding of cultural, political, and trade practice aspects that align with the CPTPP. The methods used in this study include document analysis, policy analysis, and literature review to understand the relationship between New Zealand and the Māori in cooperating under a free trade agreement. The research findings indicate that during the 2019–2023 period, New Zealand undertook several policy initiatives to achieve inclusive trade for Māori through the CPTPP. These policies include the establishment of the official board TFAAB, which functions to provide recommendations and critiques regarding decisions and policies made by the Crown related to inclusive trade in the CPTPP. New Zealand also established institutions and support communities that specifically act as Māori representatives in addressing provisions to be agreed upon in the CPTPP, such as Te Taumata, Ngā Toki Whakarururanga, FOMA, and the National Iwi Chairs Forum. During this period, New Zealand also offered solutions to address claims raised by the Māori, such as the revision of the Plant Variety Act and matters related to digital trade.

Keywords: New Zealand, Inclusive Trade, Māori, CPTPP